

MANAJEMEN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

Muhammad Rifqi Wahyudi
NPP.29.1036

*Asdaf Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Manajemenm Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: 29.1036@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): Mempawah Regency is located in West Kalimantan which consists mostly of peatlands. The condition of Mempawah Regency with extensive peatlands and forests creates the potential for forest and land fire disasters every year. Therefore, there is a need for the role of various parties such as the government, the private sector and the entire community to always maintain and preserve the forest so that the number of forest fires can be suppressed so that it will be able to reduce the impact that will be caused by forest fires themselves. **Objectives:** To find out and explain the condition of forest and land fires in Mempawah Regency, to explain management activities for handling forest and land fires emergency response in Mempawah Regency and to explain what are the supporting factors and inhibiting factors in the management of the emergency response to forest fires. and land in Mempawah Regency. The emergency response intended in this study is the process of assessing conditions, determining status, extinguishing fires and evacuating and recovering. **Methods:** The method used in this research is a qualitative descriptive method with an inductive approach, and uses data collection techniques in the form of interviews and documentation. Technical analysis of data with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Careful problems using disaster emergency response management based on Law Number 24 of 2007 with a focus on condition assessment, status determination, fire fighting, rescue and evacuation. **Results/Findings:** every year in Mempawah Regency there are always cases of forest and land fires which are almost entirely due to land clearing by burning forests, the condition of peatlands and the dry season plus weather such as wind makes fires very easy to spread, the regional disaster management agency of Mempawah Regency has carry out emergency response management management as an effort to reduce the impact caused by forest and land fire disasters, human resources and forest and land fire information systems are supporting factors in the field, while the inhibiting factors are limited water sources in disaster locations, road access is difficult to pass by cars, smog that disturbs the view as well as peatlands and weather. **Conclusion:** disaster management in the Mempawah district always makes efforts to overcome the obstacles encountered in the

emergency response process so that the forest and land fire disaster does not last long and the community does not feel the serious impact of this disaster.

Keywords: *Management, Disaster, Emergency Response*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Mempawah terletak di Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari lahan gambut. Kondisi Kabupaten Mempawah dengan lahan gambut dan hutan yang luas menimbulkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya, Oleh karena itu perlunya peranan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta serta seluruh masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan sehingga angka kebakaran hutan dapat ditekan sehingga akan dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu sendiri. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, untuk menjelaskan kegiatan manajemen penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah dan untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah. Tanggap darurat yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu proses pengkajian kondisi, penetapan status, pemadaman kebakaran serta evakuasi dan pemulihan. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan teliti menggunakan manajemen tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan fokus pada pengkajian kondisi, penetapan status, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi. **Hasil/Temuan:** setiap tahun Kabupaten Mempawah selalu ada kasus kebakaran hutan dan lahan yang hampir seluruhnya dikarenakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, kondisi lahan gambut dan musim kemarau ditambah cuaca seperti angin membuat kebakaran menjadi sangat mudah meluas, badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Mempawah sudah melakukan manajemen penanganan tanggap darurat sebagai upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan, sumber daya manusia dan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor pendukung dilapangan, sementara faktor penghambatnya ialah terbatasnya sumber air di lokasi bencana, akses jalan sulit dilewati mobil, kabut asap yang mengganggu pandangan serta lahan gambut dan cuaca. **Kesimpulan:** penanggulangan bencana daerah kabupaten mempawah selalu melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam proses tanggap darurat sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan tidak berlangsung lama dan masyarakat tidak merasakan dampak serius dari bencana ini.

Kata Kunci: **Manajemen, Bencana, Tanggap Darurat**

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Didukung letaknya yang strategis Indonesia berada pada lintasan *ring of fire* sehingga memiliki potensi bencana yang besar. Bencana sendiri adalah kejadian atau keseluruhan kejadian yang mengakibatkan meningkatnya korban juga kerusakan serta kerugian pada harta benda begitu pula dengan infrastruktur dan pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan yang skalanya di luar kapasitas norma (Couburn, dkk, 1994). Salah satu bencana yang dapat terjadi di kawasan hutan ialah kebakaran hutan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat terjadi karena beberapa hal, untuk kebakaran hutan dan lahan apabila dilihat dari faktor alam itu dapat terjadi karena terkena sambaran petir yang menghasilkan percikan api yang dapat menjadi awal dari kebakaran hutan dan juga dari aktivitas vulkanis seperti terkena lahar panas gunung berapi, selain itu pada musim kemarau juga dapat terjadi kebakaran di bawah tanah. Untuk faktor non alam itu sendiri disebabkan oleh manusia seperti memanfaatkan musim kemarau sebagai waktu untuk melakukan pembakaran hutan dengan tujuan membuka lahan baru dan juga membuang puntung rokok sembarangan dengan kondisi masih menyala. Faktor alam dan non alam ini yang dapat membuat kebakaran hutan dan lahan dan menyebabkan kerugian dari segi materi dan non materi juga kerusakan lingkungan dan juga yang terparah dapat memakan korban dan berpengaruh terhadap psikologi masyarakat sekitar bencana (Rasyid, 2014).

Berdasarkan data diketahui bahwa luas sebaran kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 151.919,00 Ha dan luas sebaran kebakaran hutan dan lahan terendah pada tahun 2017 yaitu 7.467,33 Ha, juga kita bisa lihat pada tabel diatas pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 7.646 Ha ke 15.309 yang artinya mengalami lebih dari 100% kenaikan. Sehingga membutuhkan peran besar dari badan penanggulangan bencana daerah terutama pada tahap tanggap darurat agar kasus kebakaran hutan dan lahan dapat selesai dengan cepat, tidak semakin meluas dan mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Salah satu wilayah di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Mempawah. Sebagian besar Kabupaten Mempawah berupa lahan gambut sehingga cocok digunakan untuk pertanian. Akan tetapi lahan gambut dan hutan yang luas menimbulkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya, Oleh karena itu perlunya peranan dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta serta seluruh masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan sehingga angka kebakaran hutan dapat ditekan sehingga akan dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh kebakaran hutan itu sendiri. Kebakaran Hutan dan Lahan dapat mengganggu aktivitas manusia, baik dari segi ekologi, sosial, budaya, ekonomi maupun merusakkan lingkungan dan lain-lain.

Di Kabupaten Mempawah pada tahun 2018-2019 menjadi puncak angka tertinggi kebakaran hutan dan lahan mulai dari luasnya daerah cakupan dari kebakaran hutan dan lahan hingga banyaknya lokasi dari kebakaran hutan dan lahan serta kejadian pada 2019 tersebut membuat kegiatan masyarakat di Kabupaten Mempawah terganggu akibat asap yang ditimbulkan oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan. Guna menanggulangi hal tersebut diperlukan peran badan

penanggulangan bencana daerah khususnya dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan efektif mulai dari pengkajian kondisi, penetapan status, proses pemadam dan juga proses evakuasi sehingga dampak yang ditimbulkan dari bencana ini dapat dikurangi dan memperkecil dampaknya bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena area kebakaran hutan terjadi pada daerah hutan yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan sehingga dalam pelaksanaan pemadaman akan mengalami kesulitan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan Tanggung jawab untuk melakukan upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Mempawah. Berbagai upaya untuk mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah dilakukan untuk memadamkan titik api yang masih terpantau melalui satelit, berbagai upaya pemadaman dilakukan diantaranya dengan membentuk Satuan tugas Kebakaran hutan dan lahan gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah bersama TNI/Polri, satgas gabungan ini tetap memantau situasi melalui posko siaga bencana yang terdapat di setiap Kecamatan walaupun masih ditemui berbagai kendala diantaranya kekeringan yang cukup Panjang disebabkan oleh musim kemarau, selain itu kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai dampak berbahaya yang ditimbulkan juga melihat bagaimana masyarakat yang kehilangan harta, tempat tinggal bahkan nyawa maka perlunya peranan BPBD dalam penanganan Tanggap darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan yang cepat dan efektif. Meskipun telah terdapat upaya dari Pemkab Mempawah dalam menangani kebakaran hutan, akan tetapi faktanya upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan masih mengalami berbagai hambatan dan kendala. sehingga diperlukan proses penanganan lebih lanjut terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mempawah yang bebas dari Kebakaran Hutan dan lahan.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Sunanto (2008) yang berjudul *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*. Yang menemukan hasil bahwa bahwa seringkali terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan rasau jaya itu karena untuk pertanian pada jenis tanaman pangan semusim untuk penyiapan lahannya masih dilakukan dengan cara lahan yang dibakar, yang terjadi di Kecamatan Rasau Jaya itu ialah kebakaran untuk lahan-lahan pertanian yang memang dibiarkan kosong dan pencegahan kebakaran lahan ini telah dilaksanakan dengan pembakaran yang terkendali, dan dengan ditetapkannya aturan desa serta adanya kesepakatan masyarakat yang sudah terbukti efektif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, masyarakat telah melakukan upaya penanggulangan secara cepat dan bersama-sama dengan memprioritaskan lahan yang mempunyai potensi ekonomi, upaya pemerintah dengan

melibatkan masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli api belum efektif dikarenakan itu masih bersifat formalitas. Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi bukan karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan, akan tetapi lebih kepada adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, penelitian dari Atul Yogo Pratmo, dkk (2018) dengan judul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banjar*. Menemukan hasil bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas serta Akuntabilitas sudah menunjukkan hasil yang baik. Akan tetapi penulis melihat masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya seperti agar menambah jumlah anggota, menambah sarana dan prasarana sehingga dapat menunjang kinerja dari BPBD agar lebih optimal. Ketiga, penelitian Tri Anggraini dan Dimas Agustian (2021) yang menemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berperan sesuai dengan kewajiban dan fungsinya sebagai organisasi yaitu sudah melakukan jadian risiko di Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian risiko itu dilakukan dalam tiga tahapan utama yaitu dengan menetapkan kondisi daerah, kondisi lahan dengan melalui tingkat kerawanan juga titik panas, serta memberikan informasi berupa kondisi di lapangan kepada masyarakat juga Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sosialisasi.

1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. penulisan yang dilakukan merupakan penulisan yang berbeda dengan penulisan sebelumnya dan perbedaan berada pada fokus serta juga lokus nya, pada penulisan yang akan dilakukan penulis akan berfokus pada penanganan pada saat tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta lokus berada di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kondisi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, untuk menjelaskan kegiatan manajemen penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah dan untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah. Tanggap darurat yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu proses pengkajian kondisi, penetapan status, pemadaman kebakaran serta evakuasi dan pemulihan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang

dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yang ditetapkan melalui *purposive sampling* yakni Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mempawah (1 orang), Kabid Penanggulangan bencana (1 orang), Kabid Kebakaran (1 orang), kasubid Penanggulangan bencana dan Kebakaran (1 orang), Petugas lapangan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Mempawah (2 orang). Serta narasumber yang ditetapkan melalui *snowball sampling* yakni masyarakat yang bermukim di daerah rentan kebakaran hutan dan lahan (4 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dalam mengkaji permasalahan, penulis menggunakan manajemen tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan fokus pada pengkajian kondisi, penetapan status, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah

Bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayahnya yang merupakan wilayah hutan dan lahan gambut. Motif dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia ialah pertimbangan aspek ekonomi, dikarenakan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan memerlukan biaya yang sangat murah dibandingkan harus melakukan pembukaan lahan dengan cara menyewa orang ataupun dengan menggunakan alat sehingga masyarakat yang kesadaran dirinya masih rendah lebih memilih melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurut data, bencana kebakaran hutan sering terjadi saat musim kemarau.

Dari tahun 2018-2021 kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan 1250,3 Ha dan tersebar di 58 Lokasi di seluruh Kabupaten Mempawah, dan ditahun 2019 ini juga Bupati Mempawah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah, dan dengan keterangan tambahan yaitu tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah, kemudian lahan yang terbakar seluruhnya merupakan lahan gambut yang memang mudah terbakar, dan untuk tahun 2019 terdapat 1 buah sekolah dasar (SD) yang terbakar dan itu setidaknya menghancurkan 3 lokal/kelas yang terjadi di Dusun Telayar Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur.

Seringnya bencana kebakaran hutan terjadi, menyebabkan Bupati Mempawah mengeluarkan Keputusan Bupati untuk melakukan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan setiap tahunnya dengan status tanggap darurat yang berbeda-beda. Sosialisasi terus dilakukan oleh BPBD agar masyarakat paham akan bahaya dan akibat yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar lahan ini, Penulis juga ikut andil dalam hal ini yang mana penulis ikut membuat poster yang akan di sebar oleh pihak BPBD ke titik-titik rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai pengingat untuk masyarakat agar tidak lagi membakar lahan.

3.2. Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran hutan dan Lahan di Kabupaten mempawah

Peneliti dalam menganalisis manajemen penanganan yang dilakukan dalam kebakaran hutan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan manajemen tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan fokus pada pengkajian kondisi, penetapan status, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.

A. Pengkajian Kondisi

Pengkajian kondisi adalah hal yang paling pertama dilakukan pada saat tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan, tujuan dilaksanakannya pengkajian kondisi ini ialah melihat kondisi terkini di lokasi kejadian sehingga penanganan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan tepat dan pengkajian kondisi ini dilakukan secara terus-menerus selama tanggap darurat bencana agar kondisi terkini di lapangan/lokasi kejadian terus dapat diketahui. Pengkajian Kondisi ini dilakukan untuk menentukan dimana titik lokasi/menentukan jangkauan lokasi bencana, mengukur jarak lokasi kejadian dengan jalan raya dan pemukiman, melihat ada tidaknya sumber air disekitar lokasi bencana, memantau sebenarnya banyak titik api, melihat jarak pandang.

- Menentukan Jangkauan Lokasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam penentuan jangkauan lokasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah itu merupakan seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mempawah, yang mana bahwa jangkauan lokasi bencana kebakaran hutan dan lahan mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Mempawah yang mana sesuai dengan PerBup No. 52 Tahun 2018 Tentang Kode dan Tata Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Mempawah yang meliputi 9 wilayah kecamatan dengan total luash wilayah yaitu 2.797,88 km².

- Deteksi Hotspot pada Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Deteksi hotspot merupakan salah satu kegiatan yang selalu dilakukan secara terus menerus oleh pihak BPBD Kabupaten Mempawah, pengecekan hotspot ini harus selalu dilakukan dan di cek agar ketika terdapat hotspot yang berpotensi menjadi hotfire dapat segera ditindaklanjuti. Pengecekan hotspot dilakukan dengan dukungan sistem informasi melalui web yang menunjukkan bahwa dalam pantauan satelit NOAA20 jumlah hotspot tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 250 titik. Semua dapat mengecek informasi hotspot melalui web yaitu Sipongi dan juga LAPAN yang mendapatkan informasi melalui satelit NOAA dan Terra/Aqua Modis, yang mana kedua satelit ini yang masih sampai saat ini dapat memberikan informasi dan yang paling efektif dalam memantau hotspot dan area kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaannya satelit yang mendeteksi adanya hotspot itu bukan berarti adanya kebakaran disana dikarenakan hotspot berbeda dengan hotfire, satelit mendeteksi suatu lokasi menjadi hotfire apabila dilokasi tersebut memiliki suhu yang lebih panas disbanding daerah sekitarnya biasanya berkisar antara 37-42 ° Celcius.

- Perkembangan Indeks Standar Pencemaran Udara dan Jarak Pandang pada saat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan hal yang paling berpengaruh untuk membuat kegiatan masyarakat sehari-hari menjadi terhambat yaitu Asap yang ditimbulkan akibat

kebakaran hutan dan lahan, dan Asap ini juga yang menjadi bencana dalam bencana kebakaran hutan dan lahan dikarenakan banyak hal yang dapat ditimbulkan oleh asap. IPSU ini sendiri ditetapkan berdasarkan parameternya yaitu Karbon Monoksida (CO), Partikulat (PM10 dan PM 2,5), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Dioksida (NO₂), Ozon (O₃) dan Hidrokarbon (HC). Jadi memang ketika terjadi bencana kebakaran itu pastinya akan menimbulkan asap yang banyak yang berpengaruh terhadap kualitas udara. begitu pula dengan jarak pandang yang dikeluarkan oleh BMKG ini berpengaruh terhadap dunia transportasi mulai dari banyaknya kecelakaan akibat asap ini dikarenakan jarak pandang bisa hanya sebatas 2-3 meter, pemberian izin terbang pesawat dan kapal laut karena asap mengakibatkan jarak pandang yang terbatas dan dapat membahayakan, asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat berbahaya bagi penderita penyakit asma atau salurh pernafasan dan juga berbahaya bagi ibu hamil dikarenakan asap tersebut dapat mempengaruhi kualitas kandungan dari ibu hamil dan efeknya tidak langsung namun nantinya bagi yang dilahirkan dapat terkena stunting.

B. Penetapan Status Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana dan mengacu pada pasal 23 yaitu penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan tingkatan bencana. Maka penetapan status tanggap darurat ialah sebuah proses dimana sebuah kejadian/bencana yang terjadi di suatu daerah yang mana kejadian/bencana tersebut mengakibatkan ancaman dan apakah kejadian/bencana tersebut dapat dikategorikan sebagai darurat bencana atau hanya kepada siaga bencana, untuk menentukan dan menetapkan status pada pada suatu bencana haruslah melalui proses dan ada indikator-indikator yang menjadi acuan sehingga status pada suatu bencana dapat ditetapkan. Penetapan status bencana kebakaran hutan dan lahan baik itu siaga maupun tanggap daerah akan ditetapkan oleh kepada daerah baik Bupati/waliKota yang mana penetapan tersebut merupakan hasil rapat dan rekomendasi dari instansi dan Lembaga terkait yang memang punya hubungan dan terlibat dalam pengkajian kondisi yang dilakukan sebelumnya sehingga memang penetapan status ini dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, bagaimana dampak yang dihasilkan oleh bencana tersebut.

C. Pemadaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

- Operasi Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan Jalur Darat

Tidak semua kebakaran hutan dan lahan bisa diselesaikan dengan jalur darat, ada beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan yang memang dalam penanganannya tidak bisa diselesaikan dengan pemadaman jalur darat. Pada tahun 2019 sejak di tetapkan status tanggap darurat dan dibentuk komando tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dari 20 agustus hingga 2 september pihak satgas harus memadamkan api se luas 879,5 Ha yang mana kebakaran tersebut tersebar di 20 lokasi di Kabupaten Mempawah. Peralatan yang tersedia dan digunakan merupakan barang inventaris yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah, barang inventaris

tersebut akan digunakan apabila terjadi sesuatu yang mendesak yang memerlukan penanganan secara cepat dan dalam situasi yang mungkin untuk dilaksanakan pemadaman secara langsung melalui darat, ini dilakukan setelah mendapat laporan dari warga sekitar kejadian dan juga merupakan pantauan dari satelit NOAA20 yang bisa langsung dilihat melalui web dan aplikasi dan juga dengan melalui koordinasi dengan pihak BMKG, apabila telah mendapat laporan kebakaran maka personil akan langsung berangkat ke lokasi kejadian dan menggunakan alat pelindung diri dan alat komunikasi sehingga dapat memberikan pantauan langsung dilokasi kejadian. dalam pemadaman jalur darat banyak yang harus diperhatikan terutama jarak kebakaran dengan jalan raya, sumber air dan cara melakukan pemadaman yang memang sudah dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran, dan jika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang besar seperti tahun 2019 maka pihak damkar swasta juga ikut turun membantu.

- Operasi Pemadaman Jalur Udara

- 1) Water Bombing

Water Booming ini adalah salah satu cara yang dilakukan dalam upaya pemadaman yang dilakukan pada jalur udara yang dalam pelaksanaannya dilakukan menggunakan helikopter, dan untuk hal ini tidak bisa ditangani oleh BPBD Kabupten Mempawah sendiri melainkan harus mendapat bantuan dari Provinsi. apabila pada suatu kasus kebakaran hutan dan lahan ketika dilakukan peninjauan lokasi bencana dan diperkirakan tidak bisa dilakukan pemadaman melalui jalur darat maka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melakukan Pemadaman jalur udara dengan meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi.

- 2) Teknologi Modifikasi Cuaca

Cara kedua untuk melakukan usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa dilakukan melalui jalur darat ialah melakukan teknologi modifikasi cuaca atau yang biasa disebut dengan hujan buatan, yang hujan buatan ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang mana hujan buatan ini tidak serta merta bisa berhasil juga tergantung dengan nada tidaknya awan Cumulus yang punya potensi besar untuk hujan, hujan buatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan Natrium Clorida (NaCl) ke awan.

D. Penyelamatan dan Evakuasi

Setelah dilakukan Pemadaman dari bencana kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya adalah Tindakan penyelamatan dan juga pemulihan, dan kedua hal ini yang merupakan upaya lanjutan untuk penanganan tanggap darurat, dikarenakan setelah terjadi bencana tersebut pasti akan ada korban baik itu korban secara langsung ataupun korban dari dampak bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut yaitu asap yang ditimbulkan.

Pihak BPBD juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang mana juga merupakan komando tanggap darurat bencana, bekerja-sama untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat korban terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan, dan juga ini ditujukan kepada para petugas pemadam kebakaran yang mana apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi sesuatu hal seperti luka ataupun sakit pada saat bertugas. Dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ini pihak dinas terkait melakukan berbagai persiapan seperti penyiapan

kebutuhan logistik (masker, dll), melakukan pendistribusian obat-obatan, menyiapkan pos pelayanan kesehatan di pengungsian. pemerintah dalam proses evakuasi dan pemulihan betul-betul memberikan fasilitas kesehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang merasakan dampak yang disebabkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Penanganan tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

A. Faktor Pendukung Penanganan tanggap darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

1) Sumber Daya Manusia

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang sangat mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat dikarenakan dampak asap yang ditimbulkan dapat mengganggu Kesehatan masyarakat, dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya ketika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan masyarakat ikut berpartisipasi dan membantu proses penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan juga untuk menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara illegal karena bencana kebakaran hutan dan lahan ini faktor penyebabnya sebagian besar merupakan akibat kurang sadarnya dan kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah melakukan salah satu upaya untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menyebarkan poster bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2) Sistem Informasi Kebakaran hutan dan Lahan

Terknologi informasi setiap tahunnya semakin berkembang demikian pula pada bidang bencana kebakaran hutan dan lahan, penggunaan teknologi dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan membuat proses penanganan bencana menjadi lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Penggunaan Teknologi Informasi pada penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah yaitu dengan memantau dan mengontrol kondisi iklim, terutama ketika memasuki musim kemarau informasi mengenai iklim akan terus diberitahukan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat agar pada saat musim kemarau dan iklim sangat panas diharapkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran karena yang ditakutkan apabila melakukan pembakaran ketika musim kemarau ditambah iklim yang sangat panas akan memicu terjadinya bencana kebakaran yang besar. Selain itu juga Badan Penanggulangan Bencana daerah juga dapat memantau informasi mengenai titik panas melalui satelit yang dapat dipantau melalui web dan aplikasi.

B. Faktor Penghambat Penanganan tanggap darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

1) Terbatasnya Sumber Air di Lokasi Bencana

Dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan proses pemadaman menjadi hal yang paling memerlukan penanganan yang tepat dan juga sigap, akan tetapi banyak faktor penghambat yang dapat membuat penanganan bencana menjadi terhambat, terbatasnya sumber air di

lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu masalah yang menghambat proses pemadaman.

2) Akses Jalan Masuk ke lokasi Bencana

Penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan terutama pada proses pemadaman jalur darat seringkali menemui hambatan akan akses jalan. apabila jarak bencana kebakaran hutan dan lahan sudah tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam dan selang juga tidak dapat menjangkau dari sumber air ke titik api maka akan langsung menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Provisi untuk meminta bantuan pengerahan helikopter agar dapat melakukan pemadaman melalui jalur Udara.

3) Kabut asap yang membuat kesulitan dalam jarak pandang

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan ialah kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang dan juga mengganggu Kesehatan masyarakat karena asap yang dihasilkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan ini dapat membuat masyarakat mengalami gangguan pernapasan seperti asma. Selain itu juga dapat menghambat proses pemadaman kebakaran.

4) Lahan Gambut dan Cuaca yang Mempengaruhi proses Pemadaman

Kebakaran hutan dan lahan sangat mudah meluas dan menyebar akibat dibantu oleh angin, keadaan dan kencangnya hembusan angin tidak dapat dikendalikan karena itu merupakan faktor alam yang dapat menghambat proses pemadaman, pada saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan cuaca menjadi salah satu penghambat dikarenakan ketika pada saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan ditambah dengan cuaca seperti angin kencang maka akan menyebabkan api menjadi lebih sulit untuk dipadamkan dan proses terbakarnya hutan dan lahan menjadi lebih cepat untuk meluas. Selain itu hal yang menjadi faktor penghambat sekaligus kesulitan dalam memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan ialah lahan gambut.

1.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penanganan kebakaran hutan di Kabupaten Mempawah didukung oleh partisipasi masyarakat yang terlibat langsung. Sehingga dapat membantu BPBD dalam melakukan pemadaman dan pencegahan pada kebakaran hutan. Layaknya temuan Sunanto (2008) yang menyatakan bahwa adanya kesepakatan masyarakat yang sudah terbukti efektif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, masyarakat telah melakukan upaya penanggulangan secara cepat dan bersama-sama dengan memprioritaskan lahan yang mempunyai potensi ekonomi, upaya meperintah dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli api belum efektif dikarenakan itu masih bersifat formalitas. Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi bukan karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan, akan tetapi lebih kepada adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat (Sunanto, 2008).

Dalam upaya penanganan dan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Mempawah, peneliti menemukan adanya dukungan teknologi untuk mendeteksi hotspot dan upaya sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan penanganan kebakaran hutan. Layaknya temuan Tri Anggraini dan Dimas Agustian (2021) dimana BPBD Kabupaten Musi

Banyuasin melakukan kajian resiko dalam tiga tahapan utama yaitu dengan menetapkan kondisi daerah, kondisi lahan dengan melalui tingkat kerawanan juga titik panas, serta memberikan informasi berupa kondisi di lapangan kepada masyarakat juga Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sosialisasi (Anggraini & Agustian, 2021).

Dukungan dari SDM yang mumpuni serta sarana prasarana dan teknologi yang digunakan dalam rangka penanganan kebakaran hutan di Kabupaten Mempawah. Berbeda dengan temuan Pratmo, dkk (2018) yang menemukan bahwa melihat masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya seperti agar menambah jumlah anggota, menambah sarana dan prasarana sehingga dapat menunjang kinerja dari BPBD agar lebih optimal (Pratmo, 2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Mempawah masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan yang mana dikatakan itu merupakan cara yang paling mudah dan cara yang paling sederhana dan tidak memakan biaya yang besar dan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk menanggulangi kebakaran hutan dilakukan upaya tanggap darurat dengan tahapan antara lain pengkajian kondisi, penentuan status, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan dan evakuasi. Dalam penanganan kebakaran hutan didukung oleh faktor kolaborasi elemen dalam penanganan dan dukungan sistem informasi. Akan tetapi masih terdapat faktor yang menghambat yakni terbatasnya sumber air, akses jalan yang sulit, kabut asap dan lahan gambut dan angina.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penanganan Kebakaran Hutan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPBD Kabupaten Mempawah beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan. 2018 Manajemen Bencana Pengantar dan Isu-Isu Strategis, Jakarta :Bumi Aksara,
Adinugroho, W. C., I N. N. Suryadiputra, B. H. Saharjo dan L. Siboro. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Wetland International-IP Katalog* dalam Terbitan (KDT). Bogor..Jakarta: Yarsif Watampone
A.W. Coburn, dkk. 1994. *Mitigasi Bencana* Edisi 2.UND

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Carter W. Nick., 1991 *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Perpustakaan Nasional Data CIP
Manila, Philipina
- Copoola, 2006. *Introduction to international disaster management*. Burlington: Butterworth-
heinemann
- Sugiyono. (2018). *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Keputusan Bupati Mempawah Nomor 255 Tahun 2019 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana
Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Mempawah
- Agustini, Murni. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City*. Skripsi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Handayuni, L., Amran, A., & Razak, A. (2018). *Kajian Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan
Provinsi Riau Di Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Seminar Nasional Dan Diskusi Panel
Multidisiplin Hasil Penulisan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,
- Hariyati, Ismi (2019) *Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota
Palangkaraya Tahun 2015(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran Kota Palangkaraya*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah
Malang.
- Hutan, K., Lahan, D. A. N., Kabupaten, D. I., & Banyuasin, M. (2021). *Peran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan
(Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal kebijakan pemerintahan.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. “*Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Tahun 2003*.”
- L., Tacconi. (2003). Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab, biaya dan implikasi kebijakan.
Kebakaran Hutan Di Indonesia: Penyebab, Biaya Dan Implikasi Kebijakan, 38(38).
- Pratmo, A. Y., Anhar, D., Wahid, A., Publik, I. A., Publik, I. A., & Publik, I. A. (n.d.). *Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran
Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Banjar*
- Sunanto. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Lahan*. Tesis Unisversitas Diponegoro semarang.